UNIVERSITAS GADJAH MADA
Urgensi Pengaturan Perjanjian Penundaan Penuntutan terkait Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia
Muhammad Nazal Sultan Tontowi, Niken Subekti Budi Utami, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penulisan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Hiariej, Eddy O.S., 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta

Husein, Yunus dan Roberts K, 2023, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang"*, Rajawali Pers, Depok

Manthovani, Reda, Narendra Jatna, 2018, *Rezim Anti Pencucian uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*, UAI Press, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Moelong, Lexy J., 2014, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung

Rahardjo, Satjipto, 1983, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung

Silalahi, Ulber, 2009, Metode dan Metodologi Penulisan, PT Refika Aditama, Bandung

Tim POKJA Penyusunan Pedoman Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, 2017, *Tata Cara Penanganan Perkara Pidana Korporasi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Crime and Court Act 2013

Draft Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bulan Maret 2025

Draft Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bulan November 2025

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Urgensi Pengaturan Perjanjian Penundaan Penuntutan terkait Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia
Muhammad Nazal Sultan Tontowi, Niken Subekti Budi Utami, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

Undang-Undang Darurat nomor 7 tahun 1995 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 27)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 6842)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5164)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lLembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3874)

United States Code 18 U.S. Code § 3161

C. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 29 Juni 2021

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 5 April 2016

D. **Artikel Jurnal**

Alaydrus, Hussein, “Penerapan Deferred Prosecution Agreement (DPA) Sebagai Alternatif Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Korporasi di Indonesia”, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, Colume 3 No. 5, 2025.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Urgensi Pengaturan Perjanjian Penundaan Penuntutan terkait Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam
Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia**
Muhammad Nazal Sultan Tontowi, Niken Subekti Budi Utami, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Antari, Putu Eva Ditayani dan I Kadek Budiadinata Satriatama Adnyana, "Menyoal Deferred Prosecution Agreement sebagai Gagasan Baru Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi", *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2023.

Burrohim, Habi, *et.al*, "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Perjanjian Penundaan Penuntutan Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi", *Jurnal Rechtens*, Vol. 11, No. 1, 2022.

Daud, Kynan Raffael dan Mardian Putra Frans, "Deferred Prosecution Agreement (Dpa): Model Keadilan Bagi Korporasi Dan Negara Dalam Tindak Pidana Pajak Deferred Prosecution Agreement (Dpa): A Model Of Justice For Corporate And The States In Tax Crime" Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Volume 5 No. 7, 2024

Ferdian, Ardi, "Konsep *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) Dalam Pertanggung-Jawaban Pidana Korporasi Sebagai Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa" *Arena Hukum,* Vol. 14, No. 3, 2021.

Ginting, Yuni Priskila, *et al*, "Pembuktian Tindak Pidana Korporasi Berdasarkan Putusan PN Semarang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg", Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Vol 4, No. 6, 2024.

Gottschalk, Petter, "Deferred prosecution agreements as miscarriage of justice: An exploratory study of corporate convenience", *Journal of Economic Criminology*, Vol. 4, No. 100059, 2024.

Ilham, Maya Hildawati, "Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2017)", *Jurnal Verstek* Volume 7 No. 3, 2019.

Lasmadi, Sahuri dan Elly Sudarti, "Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang" Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 2, 2021.

Loin, Raymundus, et al, "Pergeseran Paradigma Pemidanaan Dari Retributif ke Restoratif Dalam Reformasi Hukum Pidana Indonesia", JUMPA BHAKTI: Jurnal Multidisiplin Pascasarjana Bhakti, Volume 2 No. 1, 2026.

Long, Tjoe Kang dan Evi Wulan, "Dasar Hukum Yang Di Tetapkan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang" *Iblam Law Review* , Vol. 5, No. 2, 2025.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Urgensi Pengaturan Perjanjian Penundaan Penuntutan terkait Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam
Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia**
Muhammad Nazal Sultan Tontowi, Niken Subekti Budi Utami, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Mulyadi, Lilik, "Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003", Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 4, No. 1, 2015.

Ogala, Tedi, Adinda Akshal Viqria, "Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Praktik Peradilan Pidana", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Volume 4 No.2, 2026.

Perez, Michel, "The rise and globalization of negotiated settlements: How an American procedure, the Deferred Prosecution Agreement (DPA), became a transnational key tool to fight transnational corporate crimes", *Rule of Law and Anti-Corruption Center Journal*, Volume 2020 No.1, 2020.

Prameswari, Anindytha Arsa, *et al*, "Deferred Prosecution Agreement: Mekanisme Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Terhadap Perusakan Lingkungan Melalui Paradigma Restorative Justice", *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* Volume 2 No.12, 2021.

Ramadhanu, Arya Ilham, "Pembuktian dalam Unsur Menyembunyikan dan Menyamarkan dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang", Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol. 2, No. 3, 2025.

Rizky, Defid Tri, Muhammad Kevin Romadhona, "Prinsip Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Yang Berdiri Sendiri (*Stand Alone Money Laundering*)", Media Juris Volume 5 No. 3, 2022

Rosalia, Agnes dan Oksep Odhayanto, "Penerapan Aturan Hukum Nasional terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering Crime:Studi Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Btm", Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Vol. 2, No. 3, 2025.

Santiawan M. and G. M. Swardhana, "Konsep Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", J. Kertha Semaya, Vol. 9, No. 6, 2021.

Simanjuntak, Melva dan Feby Nelson, "Antara Tuntutan dan Kesepakatan: BLBI dan Era Deferred Prosecution Agreement" Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 54, No. 1, 2024.

Wangga, Maria Sylvia E., "Mekanisme Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang", ADIL: Jurnal Hukum, Volume 3 No. 2, 2012.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Urgensi Pengaturan Perjanjian Penundaan Penuntutan terkait Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam
Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia**
Muhammad Nazal Sultan Tontowi, Niken Subekti Budi Utami, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Yofiza, et al, "Implementasi Pendekatan Follow The Money Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dari Sisi Penegakan Hukum Di Indonesia", Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik. Vol. 3, No. 1, 2025.

E. Hasil Penelitian/Tugas Akhir/Paper

Akbar, M. Fatahillah, "Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi", Hasil Penelitian, Seminar Nasional: Hasil-Hasil Peneliti Tahun 2015, Yogyakarta, 2015.

Harahap, Akmal, "*The Urgency To Regulate Deferred Prosecution Agreement (DPA) In Indonesia*", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2021.

Divisi Hukum dan Investigasi ICW, "Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024", Hasil Penelitian, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2024.

Nelson, Febby Mutiara, 2019, "Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan: Menggagas Penanganan Tindak Pidana Korupsi Melalui Konsep Plea Bargaining dan Defered Prosecution Agreement" Disertasi, Universitas Indonesia, Depok, 2019.

Rajarif Syah Akbar Simatupang, *et al*, "Tantangan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Kejahatan Terorganisir", Hasil Penelitian, Seminar Nasional Hukum Sosial dan Ekonomi, Medan, 2026.

Syakur, Syahrijal, *Kajian Hukum: Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Penyidikan Tindak Pidana Asalnya dilakukan oleh Penyidik L*ain, Hasil Penelitian, PPATK, Jakarta, 2021.

Tim Riset PPATK, "Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Perkara Pencucian Uang Tahun 2015", hasil penelitian, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Jakarta, 2016.

Tim Riset PPATK, "Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Perkara Pencucian Uang Tahun 2016", hasil penelitian, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Jakarta, 2017.

Tim Riset dan Pengembangan PPATK, "Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Perkara Pencucian Uang Tahun 2020", hasil penelitian, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Jakarta, 2021

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Urgensi Pengaturan Perjanjian Penundaan Penuntutan terkait Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia
Muhammad Nazal Sultan Tontowi, Niken Subekti Budi Utami, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

United Kingdom Lord Chancellor and Secretary of State for Justice, "Deferred Prosecution Agreements: Government response to the consultation on a new enforcement tool to deal with economic crime committed by commercial organisations", Hasil Penelitian, United Kingdom Ministry of Justice, London, 2012.

F. Internet

Albertina Ho, Hukum Online, "Mendorong Peran Hakim dalam Pemantauan Penetapan Perjanjian Penundaan Penuntutan" https://www.hukumonline.com/berita/a/mendorong-peran-hakim-dalam-pemantauan-penetapan-perjanjian-penundaan-penuntutan-lt69c5e730e9c21/?page=3 diakses pada 20 Mei 2026

Budi, Mulia, "Duta Palma Group Didakwa Rugikan Negara Rp 4,7 T di Kasus Pengolahan Sawit" https://news.detik.com/berita/d-7870622/duta-palma-group-didakwa-rugikan-negara-rp-4-7-t-di-kasus-pengolahan-sawit, diakses pada 11 November 2025

Dandapala, "Urgensi Pengaturan Perma tentang Deferred Prosecution Agreement (DPA)" https://dandapala.com/opini/detail/urgensi-pengaturan-perma-tentang-deferred-prosecution-agreement-dpa diakses pada 20 Mei 2026

Dandapala, "Eddy Hiariej: KUHAP Baru Tidak Boleh Ada Saling Sandera Antar Penegak Hukum" https://dandapala.com/article/detail/eddy-hiariej-kuhap-baru-tidak-boleh-ada-saling-sandera-antar-penegak-hukum diakses pada 5 Mei 2026

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, "Penyitaan Aset Kripto oleh PUPN: Tantangan dan Regulasi dalam Menghadapi Kejahatan Digital" https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/18303/Penyitaan-Aset-Kripto-oleh-PUPN-Tantangan-dan-Regulasi-dalam-Menghadapi-Kejahatan-Digital.html diakses pada 6 Juni 2026

EdmondsMarshallMcMahon, "Deferred Prosecution Agreement (DPA)" ,https://www.emmlegal.com/prosecution-areas/additional-services/deferred-prosecution-agreements-dpa/ , diakses pada 9 Juli 2026

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, "FH UGM dan NCB Interpol Indonesia Soroti Urgensi Penanganan Kejahatan Transnasional yang Melibatkan Yurisdiksi Negara Lain" https://law.ugm.ac.id/fh-ugm-dan-ncb-interpol-indonesia-soroti-urgensi-penanganan-kejahatan-transnasional-yang-melibatkan-yurisdiksi-negara-lain/ diakses pada 25 Juni 2026

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Urgensi Pengaturan Perjanjian Penundaan Penuntutan terkait Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia
Muhammad Nazal Sultan Tontowi, Niken Subekti Budi Utami, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Haryadi, Prim, 2025, "Menggagas Deferred Prosecution Agreement dalam Sistem Hukum di Indonesia", https://www.hukumonline.com/berita/a/menggagas-deferred-prosecution-agreement-dalam-sistem-hukum-di-indonesia-lt68de15fb3db0a/ diakses pada 25 November 2025

Herbert Smith Freehil Kramer, "Airbus and SFO enter into UK's largest Deferred Prosecution Agreement", https://marketing.hsfkramer.com/38/21815/landing-pages/airbus-dpa-briefing.pdf diakses pada 25 Juni 2026

Hukum Online, "DPA dalam KUHAP Baru: Mengukur Batas Diskresi Jaksa" https://www.hukumonline.com/berita/a/dpa-dalam-kuhap-baru--mengukur-batas-diskresi-jaksa-lt695b2ba161e98/?page=2 Diakses Pada 20 Mei 2026

Hukum Online, "Ahli: Pasal 74 UU TPPU dan Penjelasannya Saling Bertentangan" https://www.hukumonline.com/berita/a/ahli--pasal-74-uu-tppu-dan-penjelasannya-saling-bertentangan-lt5c340b7dc7203/ diakses pada 8 Juni 2026

Justisio,"Jaksa Bisa Tunda Penuntutan Korporasi via DPA", https://justisio.com/blog/dpa-KUHAP diakses pada 17 Juni 2026

KumparanNEWS, "PPATK: Transaksi Korupsi Tahun 2024 mencapai Rp984 Triliun" https://kumparan.com/kumparannews/ppatk-transaksi-korupsi-tahun-2024-mencapai-rp-984-triliun-24vbsBsuZz6/1 diakses pada 11 November 2025

MoloLamken LLP, "What's a Deferred Prosecution Agreement?" https://www.mololamken.com/knowledge-Whats-a-Deferred-Prosecution-Agreement diakses pada 16 November 2025

Nelson, Febby Mutiara, Mengenal DPA dalam KUHAP Baru: Solusi Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ekonomi oleh Korporasi" https://law.ui.ac.id/mengenal-dpa-dalam-kuhap-baru-solusi-alternatif-penyelesaian-tindak-pidana-ekonomi-oleh-korporasi-oleh-dr-febby-mutiara-nelson-s-h-m-h/ diakses pada 30 April 2026

Primantoro, Agustinus, "Industrialisasi Jadi Jalan Keluar dari Jebakan Negara Berpendapatan Menengah", https://www.kompas.id/artikel/industrialisasi-jadi-jalan-keluar-dari-jebakan-negara-berpendapatan-menengah-1 diakses tanggal 11 November 2025

Sutiawan, Iwan, "JPU Tuntut PT Pinnacle Persada Investama Dipidana Denda Rp75 Miliar terkait Jiwasraya", https://www.gatra.com/news-540401-

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Urgensi Pengaturan Perjanjian Penundaan Penuntutan terkait Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia
Muhammad Nazal Sultan Tontowi, Niken Subekti Budi Utami, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

hukum-jpu-tuntut-pt-pinnacle-persada-investama-dipidana-denda-rp75-miliar-terkait-jiwasraya.html diakses pada 11 November 2025

Universitas Gadjah Mada, "Perjanjian Penangguhan Penuntutan Kejahatan Korporasi Dinilai Bisa Jadi Alternatif Penyelesaian Perkara" https://ugm.ac.id/id/berita/perjanjian-penangguhan-penuntutan-kejahatan-korporasi-dinilai-bisa-jadi-alternatif-penyelesaian-perkara/ diakses pada 30 April 2026

U.S. Department of Justice, "Rolls-Royce plc Agrees to Pay $170 Million Criminal Penalty to Resolve Foreign Corrupt Practices Act Case", https://www.justice.gov/archives/opa/pr/rolls-royce-plc-agrees-pay-170-million-criminal-penalty-resolve-foreign-corrupt-practices-act diakses pada 25 Juni 2026